



Analisis Strategis Manajemen Perencanaan Pembangunan Daerah

(Studi Integrasi Kebijakan, Kapasitas Fiskal dan Partisipasi Publik
di Kabupaten Tulang Bawang)

Fahry Ganang Saputra

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Indonesia

Penulis Korespondensi: fganangsaputra@gmail.com

Abstract. *This study aims to analyze the dynamics of development management in Tulang Bawang Regency, particularly in integrating policy, fiscal capacity, and public participation during the transition to the 2025–2029 Regional Medium-Term Development Plan (RPJMD). The study employed a descriptive qualitative method using data triangulation techniques derived from regional planning documents, financial statistical reports, and sectoral program evaluation results. The findings reveal that Tulang Bawang Regency has achieved significant progress in regional transformation and succeeded in reducing stunting rates through the Bergerak Melayani Warga (BMW) program. However, these achievements have not been supported by strong fiscal independence, while public participation remains largely dominated by a technocratic approach. The study highlights the urgent need for reforms in digitalization-based regional revenue management and stronger substantive community involvement to ensure that future regional development becomes more independent, participatory, sustainable, and inclusive in accordance with local community aspirations. These reforms are expected to strengthen governance effectiveness and improve equitable development outcomes across all regional sectors.*

Keywords: *Development Management; Fiscal Independence; Public Participation; Regional Planning; Tulang Bawang.*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mendalam dinamika manajemen pembangunan di Kabupaten Tulang Bawang khususnya dalam menyinergikan integrasi kebijakan, kapasitas fiskal, dan partisipasi publik pada masa transisi menuju RPJMD 2025-2029. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan teknik triangulasi data yang bersumber dari dokumen perencanaan daerah, laporan statistik keuangan, serta hasil evaluasi program sektoral. Hasil temuan menunjukkan bahwa meskipun Kabupaten Tulang Bawang mencatat capaian impresif dalam transformasi kewilayahan dan penurunan angka stunting melalui program Bergerak Melayani Warga (BMW), keberhasilan tersebut belum dibarengi dengan kemandirian fiskal yang kuat serta partisipasi publik yang masih didominasi oleh pendekatan teknokratis. Implikasi dari penelitian ini menekankan mendesaknya restrukturisasi manajemen pendapatan daerah berbasis digitalisasi dan penguatan pelibatan masyarakat yang substantif guna menjamin keberlanjutan pembangunan daerah yang mandiri dan inklusif serta mampu meningkatkan efektivitas tata kelola pemerintahan secara berkelanjutan. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah daerah dalam menyusun kebijakan pembangunan yang adaptif, partisipatif, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat

Kata Kunci: Kemandirian Fiskal; Manajemen Pembangunan; Partisipasi Publik; Perencanaan Wilayah; Tulang Bawang.

1. PENDAHULUAN

Perencanaan pembangunan daerah merupakan instrumen krusial dalam menentukan arah kemajuan suatu wilayah, terutama dalam menghadapi dinamika ekonomi global yang tidak menentu (Nasution et al., 2026). Di Indonesia, otonomi daerah memberikan ruang bagi pemerintah kabupaten untuk merumuskan strategi mandiri yang selaras dengan potensi lokal masing-masing (Handraini et al., 2024). Namun, tantangan besar sering kali muncul ketika kebijakan yang dirancang di tingkat pusat harus diakomodasi ke dalam realitas keterbatasan sumber daya di tingkat daerah yang menuntut adanya manajemen perencanaan yang presisi

dan adaptif. Manajemen pembangunan daerah di Indonesia telah mengalami transformasi paradigmatik pasca penerapan otonomi seluas-luasnya (Mardiasmo, 2021; Putri et al., 2025).

Dalam konteks ini, perencanaan bukan lagi sekadar instrumen administratif untuk memenuhi mandat regulasi pusat, melainkan sebuah mekanisme strategis untuk mengoptimalkan potensi lokal guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Kabupaten Tulang Bawang, sebagai salah satu pilar ekonomi di Provinsi Lampung, saat ini berada pada persimpangan krusial dalam siklus perencanaan jangka menengahnya. Seiring dengan berakhirnya periode efektif Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2005-2025 dan persiapan implementasi RPJMD 2025-2029, diperlukan evaluasi menyeluruh terhadap efektivitas manajemen pembangunan yang telah dijalankan.

Selama satu dekade terakhir, Kabupaten Tulang Bawang menunjukkan tren kemajuan pembangunan fisik dan sosial yang signifikan. Indikator utama yang sering digunakan untuk mengukur keberhasilan pembangunan di tingkat mikro adalah Indeks Desa Membangun (IDM). Pada tahun 2016, Tulang Bawang masih didominasi oleh wilayah dengan status tertinggal, mencakup 11 kecamatan dan 101 desa yang masuk dalam kategori ini (Rini et al., 2024). Namun, pasca intervensi kebijakan yang masif dan pemanfaatan Dana Desa yang terarah, pada tahun 2022, status tersebut berubah drastis dengan tidak adanya lagi kecamatan yang berstatus tertinggal. Keberhasilan ini mencerminkan efektifitas perencanaan dalam penyediaan infrastruktur dasar dan pelayanan publik di perdesaan (Rini et al., 2024). Namun, kesuksesan di tingkat pembangunan fisik dan status kewilayahan ini menciptakan sebuah anomali atau *gap analysis* yang tajam jika disandingkan dengan kapasitas fiskal daerah. Salah satu tantangan struktural terbesar yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang adalah rendahnya tingkat kemandirian fiskal. Data realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) menunjukkan bahwa target yang ditetapkan sering kali gagal tercapai, bahkan cenderung mengalami penurunan realisasi setiap tahunnya dalam periode 2017-2021.

Ketidakmampuan daerah untuk mengoptimalkan sumber pendapatan mandiri di tengah peningkatan belanja pembangunan menciptakan ketergantungan yang kronis terhadap dana transfer dari pemerintah pusat. Fenomena ini menjadi lubang dalam manajemen pembangunan yang dapat mengancam keberlanjutan program-program inovatif di masa depan (Handini et al., 2025). Selain aspek fiskal, integritas proses perencanaan partisipatif juga menjadi isu krusial. Meskipun regulasi mengamanatkan keterlibatan aktif masyarakat melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dan Forum Konsultasi Publik (FKP), realitas di lapangan menunjukkan bahwa proses tersebut masih sering bersifat mobilisasi teknokratis.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) masih memegang kendali dominan dalam pengambilan keputusan akhir, sementara aspirasi masyarakat sering kali tereduksi menjadi pelengkap dokumen semata. Ketidakseimbangan antara pendekatan *top-down* dan *bottom-up* ini berpotensi menurunkan rasa kepemilikan masyarakat terhadap hasil-hasil pembangunan (Djafar & AP, 2024).

Integrasi isu sektoral di Kabupaten Tulang Bawang menghadapi tantangan besar pada pengembangan kawasan agropolitan khususnya di Kecamatan Rawa Pitu. Sebagai lumbung pangan daerah, Rawa Pitu masih terjebak dalam hambatan struktural berupa rendahnya aksesibilitas transportasi dan manajemen tata air yang belum optimal untuk mendukung produktivitas pertanian sepanjang tahun. Meskipun dokumen perencanaan telah mencantumkan kawasan ini sebagai prioritas, realisasi infrastruktur pendukung seringkali tidak sejalan dengan kebutuhan mendesak di lapangan sehingga potensi ekonomi dari sektor pertanian belum mampu memberikan kontribusi maksimal terhadap kesejahteraan petani maupun peningkatan pendapatan daerah secara signifikan.

Di wilayah perkotaan dan pesisir, manajemen pembangunan juga dihadapkan pada persoalan penanganan permukiman kumuh yang berkaitan erat dengan kantong-kantong kemiskinan. Masalah ini bersifat multidimensi, mencakup aspek sanitasi, penyediaan air bersih, hingga legalitas lahan yang memerlukan koordinasi lintas sektor antara dinas pekerjaan umum, kesehatan dan sosial. Tanpa adanya integrasi kebijakan yang presisi, intervensi fisik di kawasan permukiman cenderung hanya bersifat sementara dan tidak menyentuh akar penyebab kemiskinan, sehingga upaya menciptakan lingkungan hunian yang layak dan sehat bagi masyarakat berpenghasilan rendah masih berjalan lambat.

Selain masalah infrastruktur, keberlanjutan program sosial seperti "Bergerak Melayani Warga" berada pada titik krusial dalam masa transisi kepemimpinan daerah. Program ini sebelumnya telah terbukti efektif dalam menekan angka kemiskinan dan stunting, namun keberhasilannya sangat bergantung pada komitmen politik dan figur kepala daerah. Tantangan utamanya adalah bagaimana mentransformasikan inisiatif yang bersifat program unggulan kepala daerah menjadi standar prosedur operasi yang terlembagakan secara permanen dalam sistem birokrasi. Jika tidak segera diinstitusikan, capaian positif dalam penanganan stunting dan perlindungan sosial berisiko mengalami kemunduran seiring dengan perubahan kebijakan atau prioritas anggaran di masa depan.

Urgensi penelitian ini terletak pada krusialnya sinkronisasi antara capaian indikator makro pembangunan dengan kemandirian fiskal daerah dalam masa transisi perencanaan dari RPD 2023-2026 menuju RPJMD 2025-2029 di Kabupaten Tulang Bawang. Meskipun

program sektoral seperti "Bergerak Melayani Warga" telah menunjukkan keberhasilan dalam pengentasan kemiskinan dan penurunan angka stunting, keberlanjutan capaian tersebut terancam oleh tingginya ketergantungan pada dana transfer pusat dan rendahnya realisasi PAD. Oleh karena itu, evaluasi terhadap dominasi teknokratis dalam proses perencanaan partisipatif dan restrukturisasi manajemen pendapatan berbasis digital menjadi sangat mendesak untuk memastikan bahwa transformasi kewilayahan yang telah dicapai tidak hanya bersifat administratif tetapi juga memiliki fondasi ekonomi daerah yang tangguh dan inklusif.

Berdasarkan kompleksitas permasalahan tersebut, penelitian ini menjadi sangat mendesak untuk dilakukan sebagai upaya memberikan landasan teoritis dan praktis bagi perbaikan sistem manajemen perencanaan. Dengan menganalisis hubungan antara integrasi kebijakan, kapasitas fiskal, dan partisipasi publik, diharapkan dapat ditemukan model manajemen yang lebih tangguh dan inklusif. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi kontribusi nyata dalam memastikan Kabupaten Tulang Bawang mampu menjalankan transisi perencanaan wilayah secara efektif dan berkelanjutan bagi kesejahteraan masyarakat secara luas.

Beberapa penelitian terdahulu telah mengeksplorasi tema manajemen pembangunan dan kapasitas fiskal dengan fokus yang serupa seperti studi yang dilakukan oleh (Rini et al., 2024) yang menganalisis dampak dana desa terhadap pengembangan wilayah di Kabupaten Tulang Bawang. Sejalan dengan itu, urgensi mengenai sinkronisasi kebijakan tata ruang dan tantangan implementasinya dalam pembangunan berkelanjutan juga telah dibahas secara mendalam. Selain itu, tinjauan mengenai efektivitas perencanaan partisipatif dan evaluasi program sektoral di wilayah Lampung secara umum sering kali merujuk pada laporan strategis dari Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan Kabupaten Tulang Bawang, Provinsi Lampung (2021) yang menyoroti pentingnya keterpaduan antara infrastruktur perdesaan dengan kemandirian ekonomi lokal agar tidak terjadi ketergantungan kronis pada bantuan pemerintah pusat.

Meskipun penelitian terdahulu telah memetakan rencana pembangunan kawasan perdesaan di Tulang Bawang, masih terdapat celah penelitian mengenai bagaimana integrasi manajemen perencanaan digital dapat memitigasi ketimpangan antara target dan realisasi PAD dalam masa transisi menuju RPJMD 2025-2029. Sebagian besar studi sebelumnya cenderung berfokus pada evaluasi sektoral atau dampak pembangunan fisik secara parsial, namun belum secara mendalam menyentuh aspek dominasi teknokratis dalam Musrenbang yang menghambat pengarusutamaan gender dan kemandirian fiskal daerah secara simultan. Oleh karena itu, penelitian ini hadir untuk mengisi ruang kosong tersebut dengan menganalisis

sinergi antara kebijakan integratif, kapasitas fiskal dan penguatan partisipasi publik yang substantif sebagai solusi atas kerentanan manajemen pembangunan daerah yang masih bergantung pada dana transfer pusat.

Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk menganalisis secara komprehensif efektivitas integrasi kebijakan, kapasitas fiskal, dan partisipasi publik dalam sistem manajemen perencanaan pembangunan di Kabupaten Tulang Bawang, khususnya dalam masa transisi menuju RPJMD 2025-2029. Penelitian ini diarahkan untuk mengevaluasi sejauh mana sinkronisasi antara keberhasilan program sektoral seperti "Bergerak Melayani Warga" dengan penguatan kemandirian fiskal daerah melalui optimalisasi PAD. Lebih lanjut, studi ini bertujuan untuk merumuskan rekomendasi strategis berupa restrukturisasi model manajemen pendapatan daerah berbasis digitalisasi serta penguatan pelibatan masyarakat yang substantif guna menciptakan tata kelola pembangunan yang lebih akuntabel, inklusif dan tidak bergantung sepenuhnya pada dana transfer pemerintah pusat.

2. KAJIAN TEORITIS

Manajemen Pembangunan Daerah

Manajemen pembangunan daerah di Indonesia merupakan proses strategis yang mencakup pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan sumber daya daerah secara sistematis untuk mewujudkan target dalam dokumen perencanaan (Darmawan & Suprpta, 2020). Siklus ini operasionalisasinya diatur secara ketat oleh kerangka regulasi nasional, yaitu Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lumbanraja et al., 2025). Dalam implementasinya, manajemen perencanaan dituntut untuk memiliki kemampuan sinkronisasi yang kuat agar visi pembangunan jangka panjang dapat terakomodasi secara konsisten ke dalam rencana operasional tahunan. Lebih jauh lagi, efektivitas manajemen ini sangat bergantung pada integrasi kebijakan, baik secara vertikal yang menghubungkan pemerintah pusat hingga kabupaten, maupun secara horizontal antarperangkat daerah. Di Kabupaten Tulang Bawang prinsip integrasi ini diwujudkan melalui penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) untuk menjaga keseimbangan antara pembangunan dan daya dukung lingkungan. Oleh karena itu, manajemen pembangunan tidak hanya sekadar pemenuhan mandat administratif, tetapi menjadi mekanisme krusial untuk mengoptimalkan potensi lokal demi peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berkelanjutan.

Prinsip utama dalam manajemen pembangunan kota dan daerah berpusat pada konsep integrasi yang komprehensif untuk memastikan efektivitas kebijakan di seluruh level pemerintahan (Widjaja & Dhanudibroto, 2025). Integrasi ini mencakup dimensi vertikal yang menyelaraskan arah kebijakan antara pemerintah nasional, provinsi, hingga kabupaten serta dimensi horizontal yang mensinkronkan program antar perangkat daerah dalam satu entitas pemerintahan. Tanpa adanya integrasi yang kuat, pembangunan berisiko menjadi parsial dan saling tumpang tindih, sehingga manajemen perencanaan harus mampu bertindak sebagai perekat yang menyatukan berbagai kepentingan sektoral ke dalam satu visi pembangunan yang koheren. Di Kabupaten Tulang Bawang, implementasi prinsip integrasi ini tercermin secara nyata melalui upaya penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Langkah strategis ini dilakukan untuk menjamin bahwa setiap aktivitas pembangunan fisik dan ekonomi tetap berada dalam koridor zonasi peruntukan yang telah ditetapkan serta tidak melampaui ambang batas daya dukung lingkungan. Dengan mengintegrasikan dokumen perencanaan pembangunan dan perencanaan tata ruang, pemerintah daerah berupaya mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan sekaligus meminimalkan potensi konflik pemanfaatan ruang di masa depan (Munthe, 2025).

Paradigma Perencanaan Partisipatif dan Inklusif

Perencanaan partisipatif berpijak pada asumsi fundamental bahwa keterlibatan aktif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan merupakan kunci utama untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi hasil pembangunan (Wijaya, 2025). Dengan melibatkan warga secara langsung, program yang dirancang diharapkan lebih akurat dalam menjawab kebutuhan riil di lapangan sehingga meminimalkan potensi kegagalan proyek akibat ketidaksesuaian prioritas. Namun, implementasi konsep ini sering kali berbenturan dengan dominasi teknokratis dalam birokrasi, di mana para perencana cenderung lebih memprioritaskan data statistik dan standar teknis yang kaku dibandingkan realitas subjektif serta aspirasi yang disuarakan oleh masyarakat.

Kabupaten Tulang Bawang, tantangan dominasi teknokratis ini terlihat jelas dalam pelaksanaan forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), di mana Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) masih memegang kendali dominan dalam pengambilan keputusan akhir. Akibatnya, aspirasi masyarakat sering kali tereduksi menjadi sekadar daftar keinginan pelengkap dokumen administratif ketimbang menjadi prioritas strategis yang terukur. Ketimpangan antara pendekatan *top-down* dan *bottom-up* ini berisiko menurunkan rasa kepemilikan masyarakat terhadap hasil pembangunan, karena suara mereka dirasakan tidak memiliki pengaruh signifikan dalam siklus perencanaan (Muminah &

Suprajogo, 2025). Selain aspek keterlibatan umum, inklusivitas dalam perencanaan juga mencakup pengarusutamaan gender untuk memastikan bahwa kebijakan yang diambil merespons kebutuhan yang berbeda antara laki-laki dan perempuan secara adil. Meskipun Kabupaten Tulang Bawang telah memiliki landasan regulasi melalui Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2020, efektivitasnya dalam mengubah struktur anggaran menjadi lebih responsif gender masih memerlukan evaluasi mendalam. Hambatan seperti pemahaman SDM aparatur yang masih terbatas mengenai konsep gender serta penyusunan dokumen analisis yang bersifat formalitas sering kali menghalangi terciptanya pembangunan yang benar-benar inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat.

Desentralisasi Fiskal dan Kemandirian Ekonomi

Kemandirian fiskal merupakan prasyarat fundamental bagi suatu daerah untuk dapat mengimplementasikan otonomi daerah secara penuh dan berdaulat. Derajat desentralisasi fiskal sebuah wilayah secara empiris diukur melalui kemampuan daerah tersebut dalam membiayai belanja pembangunannya sendiri yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Berdasarkan teori manajemen keuangan daerah, pencapaian kemandirian ini memerlukan strategi intensifikasi dan ekstensifikasi pajak serta retribusi daerah yang tepat sasaran tanpa mengganggu iklim investasi lokal. Tanpa fondasi fiskal yang kuat, otoritas daerah akan sulit menentukan arah kebijakan yang mandiri karena keterbatasan sumber pendanaan internal. Di Kabupaten Tulang Bawang, rasio kemandirian keuangan daerah menjadi indikator vital untuk menilai sejauh mana wilayah ini mampu melepaskan diri dari ketergantungan kronis terhadap dana transfer pemerintah pusat. Ketergantungan tersebut sering kali menjadi hambatan karena dana transfer pusat bersifat fluktuatif dan memiliki peruntukan yang telah ditentukan *earmarked* sehingga membatasi fleksibilitas pemerintah daerah dalam berinovasi. Oleh karena itu, penguatan manajemen PAD melalui digitalisasi dan pembaruan basis data pajak menjadi langkah restrukturisasi yang krusial agar Kabupaten Tulang Bawang memiliki ruang gerak finansial yang lebih luas dalam mendanai program-program strategis sesuai kebutuhan lokalnya.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif-evaluatif yang dirancang untuk memberikan gambaran secara menyeluruh, sistematis dan mendalam mengenai dinamika proses manajemen perencanaan pembangunan di Kabupaten Tulang Bawang. Melalui metode ini, peneliti tidak hanya mendeskripsikan mekanisme penyusunan kebijakan dan alokasi anggaran, tetapi juga melakukan penilaian kritis terhadap efektivitas

hasil-hasil pembangunan yang telah dicapai, seperti transformasi status desa dan penanganan stunting, untuk kemudian dibandingkan dengan target makro yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi terhadap laporan keuangan, dokumen RPD dan RPJMD serta observasi terhadap fenomena teknokratis dalam partisipasi publik, sehingga memungkinkan peneliti untuk mengungkap kesenjangan antara realitas lapangan dengan standar ideal manajemen pembangunan daerah.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan secara komprehensif dengan mengandalkan sumber data sekunder yang diperoleh melalui studi dokumentasi terhadap berbagai dokumen resmi pemerintah serta laporan hasil penelitian terdahulu. Dokumen resmi yang dianalisis mencakup Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2023-2026, draf Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2029, Statistik Keuangan Daerah 2024, serta data Indeks Desa Membangun (IDM) periode 2016-2022 dan Peraturan Daerah terkait Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Selain itu, pengumpulan data diperkuat dengan analisis laporan hasil penelitian mengenai efektivitas program Bergerak Melayani Warga (BMW), dinamika partisipasi masyarakat, serta studi penanganan kawasan kumuh yang menggunakan metode *Analytic Hierarchy Process* (AHP) untuk memberikan landasan evaluasi yang lebih mendalam dan valid.

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan melalui pendekatan multimedan yang sistematis untuk memastikan kedalaman dan akurasi evaluasi. Tahap pertama melibatkan Analisis Perbandingan untuk meninjau efektivitas kebijakan dengan membandingkan indikator pembangunan antara periode awal perencanaan dan capaian terkini, khususnya pada data Indeks Desa Membangun (IDM) serta prevalensi stunting. Selanjutnya, digunakan Analisis Kesenjangan guna mengidentifikasi ketidaksesuaian antara target Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan realisasi keuangan aktual, sekaligus memetakan berbagai hambatan dalam implementasi kebijakan fiskal. Untuk memberikan struktur pada temuan penelitian, dilakukan pula Analisis Tematik yang mengelompokkan data ke dalam pilar-pilar utama, seperti kapasitas fiskal, partisipasi publik, integrasi kebijakan sektoral, dan dinamika transisi dokumen perencanaan.

Validitas dari seluruh temuan ini dijamin melalui teknik Triangulasi, yaitu dengan melakukan pemeriksaan silang (*kroscek*) data antara dokumen kebijakan resmi, data statistik dari Badan Pusat Statistik (BPS), dan temuan dari berbagai penelitian lapangan. Selain itu, analisis diperkuat dengan merujuk pada hasil penggunaan metode *Analytic Hierarchy Process* (AHP) dalam studi terkait untuk memberikan bobot pada kriteria prioritas penanganan masalah kewilayahan. Pendekatan AHP ini sangat krusial dalam menentukan strategi penanganan

permukiman kumuh secara presisi, seperti yang diterapkan pada kasus Kelurahan Daya Murni dan sekitarnya, sehingga alokasi anggaran dan intervensi pembangunan dapat menjadi lebih tepat sasaran.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Transformasi Status Pembangunan Kewilayahan

Capaian paling konkret dari manajemen pembangunan di Kabupaten Tulang Bawang tercermin pada pergeseran status Indeks Desa Membangun (IDM). Transformasi ini menunjukkan bahwa alokasi sumber daya dalam perencanaan pembangunan telah berhasil menyentuh kebutuhan dasar masyarakat di tingkat akar rumput (Rini et al., 2024).

Tabel 1. Perbandingan Status IDM Kabupaten Tulang Bawang.

Indikator Kewilayahan	Kondisi Tahun 2016	Kondisi Tahun 2022	Dampak Pembangunan
Kecamatan Tertinggal	11 Kecamatan	0 Kecamatan	Penghapusan keterpencilan wilayah
Kecamatan Sangat Tertinggal	1 Kecamatan	0 Kecamatan	Peningkatan aksesibilitas dasar
Kecamatan Berkembang	-	11 Kecamatan	Stabilisasi layanan publik
Kecamatan Maju	-	4 Kecamatan	Kemandirian ekonomi lokal mulai tumbuh
Desa Tertinggal	101 Desa	0 Desa	Efektivitas Dana Desa
Desa Sangat Tertinggal	15 Desa	0 Desa	Intervensi infrastruktur dasar berhasil

Sumber: Penelitian (Rini et al., 2024).

Transformasi status pembangunan kewilayahan di Kabupaten Tulang Bawang menunjukkan capaian yang sangat konkret dalam kurun waktu enam tahun terakhir. Berdasarkan data Indeks Desa Membangun (IDM), terjadi pergeseran signifikan yang mengindikasikan bahwa alokasi sumber daya dalam manajemen perencanaan telah berhasil menyentuh kebutuhan dasar masyarakat di tingkat akar rumput. Keberhasilan ini tercermin dari hilangnya kategori wilayah tertinggal yang sebelumnya mendominasi peta pembangunan kabupaten pada tahun 2016. Data perbandingan menunjukkan bahwa pada tahun 2016, Kabupaten Tulang Bawang memiliki 11 kecamatan berkategori tertinggal dan 1 kecamatan sangat tertinggal. Namun, pada tahun 2022, angka tersebut berhasil ditekan hingga mencapai nol, yang berdampak langsung pada penghapusan keterpencilan wilayah serta peningkatan aksesibilitas dasar bagi masyarakat. Perubahan ini menandakan adanya efektivitas dalam perencanaan dan eksekusi program pembangunan kewilayahan yang masif selama periode tersebut.

Kemajuan yang luar biasa juga terlihat pada level desa, di mana 101 desa yang berstatus tertinggal dan 15 desa sangat tertinggal pada tahun 2016 telah sepenuhnya terentaskan di tahun 2022. Keberhasilan penghapusan status desa tertinggal ini menjadi bukti nyata efektivitas penggunaan Dana Desa yang terarah serta keberhasilan intervensi infrastruktur dasar. Saat ini, peta kewilayahan telah didominasi oleh 11 kecamatan berkategori berkembang yang mulai menunjukkan stabilisasi layanan publik. Selain stabilisasi layanan, pertumbuhan kemandirian ekonomi lokal mulai nampak dengan munculnya 4 kecamatan yang kini berstatus maju. Munculnya kategori kecamatan maju ini menunjukkan bahwa manajemen pembangunan tidak hanya berhenti pada pembangunan fisik semata, tetapi telah mulai merambah pada penguatan struktur ekonomi di tingkat lokal. Hal ini menciptakan fondasi yang lebih kuat bagi Kabupaten Tulang Bawang untuk melangkah ke tahap pembangunan yang lebih mandiri dan kompetitif.

Secara keseluruhan, analisis data ini menegaskan bahwa manajemen pembangunan di Kabupaten Tulang Bawang telah berhasil mencapai aspek pemerataan fisik secara menyeluruh. Meski demikian, tantangan manajemen berikutnya adalah meningkatkan kapasitas desa-desa yang berstatus berkembang menjadi maju dan mandiri. Peningkatan status tersebut memerlukan pergeseran fokus perencanaan, dari yang sebelumnya menitikberatkan pada pembangunan infrastruktur menjadi pemberdayaan ekonomi produktif dan pemanfaatan inovasi teknologi perdesaan

Analisis Kinerja Program Bergerak Melayani Warga (BMW)

Program Bergerak Melayani Warga (BMW) di Kabupaten Tulang Bawang merupakan inovasi manajemen pembangunan strategis yang dirancang dengan pendekatan lintas sektoral. Salah satu pencapaian paling signifikan yang memperoleh pengakuan di tingkat nasional berada pada sektor kesehatan, terutama dalam upaya akselerasi penurunan angka stunting. Melalui koordinasi program yang terintegrasi, prevalensi stunting yang semula berada pada angka 32,49% pada tahun 2018 berhasil ditekan secara drastis hingga mencapai 9,5% pada tahun 2021. Keberhasilan luar biasa dalam penurunan stunting ini didorong oleh implementasi berbagai program spesifik yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat di tingkat kampung. Program-program pendukung tersebut mencakup BMW Sayang Ibu, gerakan Grebek Stunting, serta penyediaan fasilitas ambulans gratis yang ditempatkan di setiap kampung untuk menjamin kecepatan akses layanan kesehatan. Sinergi antara kebijakan manajemen pembangunan dengan pemenuhan infrastruktur kesehatan dasar ini terbukti menjadi kunci utama dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat di Kabupaten Tulang Bawang.

Meskipun program Bergerak Melayani Warga (BMW) telah menunjukkan keberhasilan signifikan di sektor kesehatan, efektivitasnya sebagai stimulan ekonomi bagi kelompok masyarakat seperti Muslimat, Karang Taruna, dan kelompok usaha wanita masih menghadapi tantangan besar terkait akuntabilitas dan keberlanjutan usaha. Pemberian dana stimulan dalam kerangka manajemen pembangunan sering kali belum diikuti dengan pendampingan manajemen usaha yang intensif dan sistematis. Akibatnya, bantuan modal yang diberikan cenderung hanya bersifat konsumtif atau jangka pendek, sehingga potensi ekonomi kreatif yang diharapkan mampu menjadi mesin penggerak kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Tulang Bawang belum sepenuhnya tergali secara optimal. Guna mengatasi hambatan tersebut, perencanaan pembangunan di masa depan harus mengintegrasikan program BMW ke dalam sistem pembinaan UMKM yang lebih terstruktur, komprehensif, dan berbasis pasar. Manajemen intervensi ekonomi tidak boleh berhenti pada tahap penyaluran dana semata, melainkan harus mencakup pelatihan manajerial, standardisasi produk, hingga pembukaan akses jejaring pasar yang lebih luas. Dengan menggeser paradigma dari sekadar pemberian bantuan menjadi pemberdayaan ekonomi yang terukur, pemerintah daerah dapat memastikan bahwa setiap dana stimulan yang dikeluarkan mampu menciptakan nilai tambah ekonomi yang berkelanjutan bagi kelompok-kelompok produktif di masyarakat.

Analisis Kesenjangan Fiskal dan Kemandirian Daerah

Meskipun pembangunan fisik di Kabupaten Tulang Bawang menunjukkan kemajuan yang sangat pesat, manajemen keuangan daerah masih menghadapi tantangan serius yang berpotensi menghambat akselerasi pembangunan di masa depan. Analisis terhadap postur anggaran menunjukkan adanya ketimpangan yang signifikan antara rencana pendapatan yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan dengan realisasi aktual di lapangan, terutama pada komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD). Fenomena ini mengindikasikan bahwa kapasitas fiskal daerah masih berada dalam posisi yang rentan, di mana target-target penerimaan sering kali tidak tercapai secara optimal sehingga menciptakan celah (*gap*) dalam pembiayaan program-program strategis. Oleh karena itu, diperlukan restrukturisasi manajemen keuangan yang lebih presisi melalui penguatan basis data objek pajak dan digitalisasi sistem pemungutan guna meminimalkan kebocoran serta meningkatkan kemandirian fiskal daerah secara berkelanjutan.

Tabel 2. Ringkasan Realisasi Keuangan Daerah Kabupaten Tulang Bawang.

Tahun	Realisasi Pendapatan (Miliar Rp)	Realisasi Belanja (Miliar Rp)	Catatan Kinerja PAD
2021	1.155,75	-	Target PAD tidak tercapai
2022	1.223,17	1.223,17	Tren realisasi menurun
2023	1.306,56	1.306,56	Ketergantungan transfer tinggi

Analisis terhadap realisasi keuangan daerah Kabupaten Tulang Bawang selama periode 2021-2023 menunjukkan adanya tantangan struktural dalam manajemen fiskal meskipun secara nominal terjadi peningkatan pendapatan. Pada tahun 2021, realisasi pendapatan tercatat sebesar Rp1.155,75 miliar, namun disertai catatan kritis mengenai tidak tercapainya target Pendapatan Asli Daerah (PAD). Kondisi ini mengindikasikan bahwa perencanaan pendapatan masih terlalu optimis atau terdapat kebocoran dalam sistem pemungutan pajak dan retribusi daerah yang belum tertangani secara optimal, sehingga menciptakan kesenjangan antara potensi yang dipetakan dengan likuiditas yang tersedia. Memasuki tahun 2022 dan 2023, pendapatan daerah memang mengalami kenaikan hingga menyentuh angka Rp1.306,56 miliar, tetapi tren realisasi PAD justru menunjukkan kecenderungan menurun. Penurunan tren realisasi ini menjadi sinyal waspada bagi kemandirian fiskal daerah, mengingat belanja daerah terus menyesuaikan diri dengan total pendapatan yang masuk. Ketidakmampuan PAD untuk tumbuh secara progresif di tengah peningkatan total pendapatan mengindikasikan bahwa akselerasi pembangunan ekonomi yang terjadi di level kewilayahan belum berhasil dikonversi secara efektif menjadi sumber penerimaan daerah yang berkelanjutan.

Tingginya ketergantungan terhadap dana transfer pemerintah pusat menjadi isu sentral dalam manajemen keuangan Kabupaten Tulang Bawang, sebagaimana tercermin pada kinerja tahun 2023. Ketergantungan yang masif ini sangat berisiko karena dana transfer pusat sering kali bersifat fluktuatif dan telah ditentukan peruntukannya (*earmarked*), sehingga membatasi ruang diskresi pemerintah daerah untuk mendanai program inovasi lokal yang spesifik. Oleh karena itu, strategi manajemen ke depan harus diprioritaskan pada intensifikasi dan ekstensifikasi sumber pendapatan mandiri agar otonomi daerah tidak sekadar menjadi kemandirian administratif, melainkan juga kemandirian finansial yang kokoh.

Rendahnya realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Tulang Bawang merupakan hasil dari akumulasi berbagai hambatan struktural dan operasional yang saling berkaitan. Salah satu faktor fundamental yang ditemukan adalah lemahnya basis data pajak dan retribusi daerah. Banyak objek pajak yang secara faktual ada di lapangan namun belum terdaftar secara resmi dalam sistem administrasi, atau datanya sudah tidak relevan karena tidak

pernah diperbarui. Kondisi ini menyebabkan terjadinya kehilangan potensi pendapatan (*potential loss*) yang sangat besar, di mana aktivitas ekonomi masyarakat tidak terkonversi secara maksimal menjadi sumber pendanaan pembangunan daerah. Selain masalah pendataan, efektivitas pemungutan juga terhambat oleh kurangnya ketegasan dalam penegakan hukum bagi para wajib pajak. Tidak adanya sanksi yang memberikan efek jera bagi mereka yang menunggak pajak mengakibatkan rendahnya tingkat kepatuhan fiskal di tingkat lokal. Tantangan ini semakin diperburuk oleh maraknya praktik pungutan retribusi ilegal di lapangan yang dilakukan oleh pihak-pihak tidak bertanggung jawab. Fenomena ini tidak hanya merugikan keuangan daerah secara langsung, tetapi juga merusak kepercayaan masyarakat dan pelaku usaha terhadap kredibilitas manajemen keuangan pemerintah daerah.

Hambatan lain yang bersifat sistemik adalah keterlambatan dalam pembaruan regulasi daerah. Peraturan Daerah (Perda) mengenai pajak dan retribusi sering kali tidak berjalan seiring dengan perkembangan dinamika ekonomi dan perubahan aturan di tingkat pusat. Kesenjangan regulasi ini menghambat upaya intensifikasi pendapatan, karena pemerintah daerah tidak memiliki payung hukum yang kuat untuk mengeksekusi objek pajak baru atau menyesuaikan tarif sesuai dengan nilai ekonomi saat ini. Akibatnya, manajemen fiskal daerah terkesan kaku dan lamban dalam merespons peluang-peluang penerimaan baru yang muncul dari pertumbuhan sektor swasta. Di sisi operasional, keterbatasan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) pada unit penagihan menjadi kendala nyata dalam pengawasan di lapangan. Kuantitas personel yang tidak sebanding dengan luas wilayah dan jumlah objek pajak, ditambah dengan kualitas kompetensi manajerial yang masih perlu ditingkatkan, membuat proses pemungutan pajak menjadi tidak efisien. Tanpa adanya aparatur yang terampil dalam melakukan audit dan pengawasan secara digital maupun manual, upaya untuk meminimalkan kebocoran pendapatan sulit untuk diwujudkan, sehingga target-target yang telah ditetapkan dalam perencanaan sering kali gagal tercapai.

Manajemen pembangunan yang efektif pada hakikatnya mengharuskan adanya kemandirian finansial sebagai mesin penggerak otonomi daerah. Tanpa adanya peningkatan PAD yang signifikan dan stabil, daerah akan terus terjebak dalam siklus ketergantungan pada dana transfer dari pemerintah pusat. Kemandirian fiskal bukan sekadar soal angka dalam APBD, melainkan representasi dari kemampuan daerah untuk mengelola potensi ekonominya sendiri guna mendanai agenda-agenda prioritas yang telah disepakati bersama masyarakat melalui proses perencanaan partisipatif. Ketergantungan yang tinggi terhadap kebijakan fiskal pusat pada akhirnya dapat membatasi ruang gerak pemerintah kabupaten dalam melakukan inovasi. Sifat dana transfer yang sering kali bersifat *earmarked* atau sudah ditentukan

peruntukannya membuat fleksibilitas anggaran untuk kebutuhan lokal yang mendesak menjadi sangat terbatas. Oleh karena itu, penguatan manajemen pendapatan melalui digitalisasi sistem dan restrukturisasi birokrasi penagihan menjadi langkah yang tidak bisa ditunda lagi agar visi pembangunan Kabupaten Tulang Bawang tidak sekadar bergantung pada dinamika politik dan ekonomi di tingkat nasional.

Dinamika Perencanaan Partisipatif dan Pengarusutamaan Gender

Dinamika perencanaan partisipatif di Kabupaten Tulang Bawang saat ini masih menghadapi tantangan besar dalam hal kualitas dan substansi keterlibatan publik. Meskipun mekanisme Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) telah dilaksanakan secara rutin dari tingkat desa hingga kabupaten, proses tersebut sering kali terjebak dalam formalitas administratif. Hambatan utama yang teridentifikasi adalah kuatnya dominasi teknokratis dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dalam pengambilan keputusan akhir, yang cenderung menyaring aspirasi masyarakat berdasarkan parameter teknis yang kaku ketimbang urgensi sosial di lapangan. Kondisi tersebut menyebabkan aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat dalam forum-forum publik sering kali hanya berakhir sebagai *wishlist* yang tidak terstruktur, bukan sebagai prioritas strategis yang terukur. Tanpa adanya edukasi dan pendampingan bagi masyarakat untuk memahami kerangka penganggaran daerah, usulan yang muncul cenderung bersifat parsial dan jangka pendek. Akibatnya, manajemen perencanaan gagal menangkap esensi kebutuhan riil warga, sehingga efektivitas program pembangunan dalam menjawab persoalan lokal menjadi kurang optimal.

Dalam aspek inklusivitas, Pengarusutamaan Gender (PUG) telah mendapatkan payung hukum yang jelas melalui Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2020. Namun, eksistensi regulasi ini belum sepenuhnya mampu mengubah wajah anggaran menjadi benar-benar responsif gender (*Gender Responsive Budgeting*). Kendala utama terletak pada rendahnya pemahaman Sumber Daya Manusia (SDM) di tingkat Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) mengenai konsep gender itu sendiri. Banyak aparatur yang masih menyalahartikan bahwa keterlibatan gender hanya sebatas menghitung jumlah partisipasi perempuan dalam sebuah kegiatan, tanpa menyentuh aspek akses, kontrol, dan manfaat yang setara. Keterbatasan pemahaman ini berdampak langsung pada kualitas dokumen analisis gender yang dihasilkan. Penyusunan *Gender Analysis Pathway (GAP)* dan *Gender Budget Statement (GBS)* sering kali hanya dipandang sebagai beban administratif untuk memenuhi syarat penyusunan anggaran. Tanpa adanya analisis mendalam terhadap kesenjangan gender di lapangan, dokumen-dokumen tersebut gagal menjadi instrumen koreksi kebijakan, sehingga alokasi anggaran daerah belum

mampu menyentuh akar permasalahan ketimpangan peran antara laki-laki dan perempuan dalam pembangunan (Isna et al., 2025).

Hambatan lain yang tidak kalah krusial adalah faktor budaya organisasi di lingkungan pemerintahan yang masih sangat patriarkis. Dominasi laki-laki dalam struktur pengambilan keputusan publik yang strategis menciptakan bias dalam penentuan prioritas pembangunan. Aspirasi strategis perempuan, terutama yang berkaitan dengan isu-isu perlindungan anak, ekonomi domestik, dan kesehatan reproduksi, sering kali dianggap sebagai isu sekunder. Kondisi ini menghambat terciptanya kebijakan yang benar-benar sensitif terhadap kebutuhan spesifik kelompok perempuan di Kabupaten Tulang Bawang. Oleh karena itu, manajemen perencanaan ke depan memerlukan transformasi paradigma dari sekadar mobilisasi kehadiran menjadi partisipasi yang bermakna (*meaningful participation*). Penguatan kapasitas aparatur dalam menganalisis isu gender secara substantif harus menjadi prioritas agar PUG tidak berhenti pada level retorika regulasi. Hanya dengan mengintegrasikan perspektif gender ke dalam setiap tahapan siklus perencanaan, Kabupaten Tulang Bawang dapat mewujudkan pembangunan yang inklusif, adil, dan mampu memberikan manfaat yang merata bagi seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali (Isna et al., 2025).

Terakhir, penguatan institusionalisasi PUG perlu didorong melalui mekanisme pengawasan yang lebih ketat terhadap implementasi GAP dan GBS di setiap sektor. Evaluasi berkala terhadap dampak anggaran terhadap penurunan kesenjangan gender harus menjadi salah satu indikator kinerja utama bagi pimpinan organisasi perangkat daerah. Dengan demikian, sinkronisasi antara perencanaan pembangunan dan pengarusutamaan gender dapat berjalan secara sinergis, menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih demokratis dan responsif terhadap dinamika sosial di Kabupaten Tulang Bawang (Isna et al., 2025).

Tantangan Transisi dan Strategi Masa Depan

Kabupaten Tulang Bawang saat ini sedang memasuki fase transisi kepemimpinan dan dokumen perencanaan. Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2023-2026 berfungsi sebagai jembatan untuk menjaga momentum pembangunan selama masa jabatan Penjabat Bupati hingga terpilihnya bupati definitif. Dalam draf RPJMD 2025-2029 terdapat pergeseran paradigma menuju visi "Tulang Bawang yang Unggul, Sejahtera dan Berdaya Saing". Fokus utama tahun pertama implementasi (2026) adalah penguatan modal dasar pembangunan melalui peningkatan kualitas SDM, infrastruktur dan pengembangan ekonomi produktif (RPJMD 2025-2029 & Perubahan APBD Tulang Bawang Disetujui, 2025).

Tabel 3. Misi Pembangunan Kabupaten Tulang Bawang.

Misi Pembangunan 2025-2029	Fokus Strategis	Implikasi Manajemen
Transformasi Sosial	Kualitas SDM Kreatif & Inovatif	Peningkatan anggaran pendidikan & kesehatan
Transformasi Ekonomi	Produktivitas Sektor Unggulan	Modernisasi pertanian dan UMKM
Transformasi Tata Kelola	Pemerintahan Terintegrasi	Digitalisasi layanan publik (E-Government)
Kehidupan Bermasyarakat	Keamanan & Harmonisasi Budaya	Penanganan konflik sosial dan ketertiban
Infrastruktur & Wilayah	Pembangunan Merata & Berkelanjutan	Sinkronisasi dengan RTRW 2024-2044

Sumber: Lampungpro.co.

Analisis terhadap Misi Pembangunan Kabupaten Tulang Bawang periode 2025-2029 menunjukkan adanya pergeseran paradigma manajemen pembangunan menuju tata kelola yang lebih komprehensif dan visioner. Misi pertama, yaitu Transformasi Sosial, menempatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang kreatif dan inovatif sebagai prioritas utama. Implikasi manajerial dari misi ini adalah tuntutan adanya peningkatan serta efisiensi anggaran di sektor pendidikan dan kesehatan secara berkelanjutan. Fokus ini bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang tidak hanya sehat secara fisik, tetapi juga memiliki daya saing intelektual untuk menghadapi tantangan ekonomi global di masa depan. Dalam aspek ekonomi, misi Transformasi Ekonomi diarahkan pada peningkatan produktivitas sektor-sektor unggulan daerah. Fokus strategisnya terletak pada modernisasi pertanian dan penguatan UMKM sebagai tulang punggung ekonomi kerakyatan. Manajemen pembangunan dalam periode ini harus mampu memfasilitasi transisi dari praktik tradisional menuju penggunaan teknologi tepat guna. Hal ini krusial untuk memastikan bahwa komoditas unggulan Tulang Bawang memiliki nilai tambah (*value-added*) yang lebih tinggi sehingga dapat meningkatkan pendapatan riil masyarakat dan kontribusi sektor swasta terhadap daerah (Sormin, 2025).

Transformasi Tata Kelola menjadi pilar ketiga yang menekankan pada terciptanya pemerintahan yang terintegrasi. Fokus utama dalam misi ini adalah implementasi digitalisasi layanan publik atau *E-Government* secara menyeluruh. Bagi manajemen birokrasi, hal ini berarti keharusan untuk merombak sistem pelayanan manual menjadi berbasis digital guna menciptakan transparansi, kecepatan, dan akuntabilitas. Digitalisasi bukan sekadar tren teknologi, melainkan instrumen manajemen untuk meminimalkan birokrasi yang berbelit-belit dan mendekatkan pemerintah pada kebutuhan warganya secara *real-time*. Selain aspek teknis dan ekonomi, misi mengenai Kehidupan Bermasyarakat menyoroti pentingnya keamanan dan harmonisasi budaya. Fokus pada penanganan konflik sosial dan pemeliharaan ketertiban umum menjadi dasar bagi keberhasilan pembangunan di sektor lainnya. Manajemen pembangunan di

sini berperan dalam menciptakan ruang-ruang dialog publik dan memperkuat institusi sosial lokal. Stabilitas keamanan dipandang sebagai prakondisi esensial yang menjamin iklim investasi tetap kondusif dan aktivitas sosial masyarakat dapat berjalan tanpa hambatan primordial yang kontraproduktif.

Misi terakhir terkait Infrastruktur dan Wilayah menegaskan pentingnya pembangunan yang merata dan berkelanjutan. Strategi utamanya adalah sinkronisasi rencana pembangunan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) 2024-2044. Implikasi manajemennya mengharuskan setiap proyek fisik tidak hanya berorientasi pada kemanfaatan jangka pendek, tetapi juga selaras dengan zonasi lingkungan dan rencana pengembangan jangka panjang. Sinkronisasi ini menjadi benteng bagi Kabupaten Tulang Bawang agar pertumbuhan fisik wilayahnya tetap terkontrol dan tidak merusak daya dukung lingkungan yang ada. Tantangan terbesar dalam transisi menuju misi 2025-2029 ini adalah memastikan bahwa program-program unggulan yang telah terbukti efektif pada periode sebelumnya, seperti program BMW di sektor kesehatan tetap dipertahankan (Sormin, 2025). Manajemen perencanaan harus mampu mengintegrasikan program-program sukses tersebut ke dalam struktur birokrasi yang permanen melalui pelembagaan aturan. Hal ini penting untuk mencegah risiko diskontinuitas kebijakan, sehingga keberhasilan pembangunan tidak hanya melekat pada personalitas pemimpin tertentu, melainkan menjadi standar pelayanan minimal yang melembaga di setiap instansi terkait.

Optimalisasi Kawasan Agropolitan Rawa Pitu

Kecamatan Rawa Pitu, sebagai sentra produksi padi utama di Kabupaten Tulang Bawang, merupakan aset strategis yang memerlukan manajemen perencanaan pembangunan khusus dan terintegrasi. Meskipun memiliki potensi agraris yang besar, wilayah ini masih terjebak dalam masalah di mana sebagian besar hasil produksi pertanian langsung dibawa keluar daerah dalam bentuk bahan mentah tanpa adanya nilai tambah lokal. Manajemen perencanaan yang ada saat ini dituntut untuk mampu mentransformasi Rawa Pitu dari sekadar basis produksi menjadi kawasan industri pertanian yang mandiri dan kompetitif. Isu strategis yang menyelimuti kawasan ini tidak hanya terbatas pada sektor pertanian, tetapi juga mencakup aspek infrastruktur dasar seperti ketersediaan listrik dan akses air bersih yang masih terbatas. Selain itu, masalah manajemen pengairan yang ekstrem, seperti ancaman banjir pada musim hujan dan kekeringan pada musim kemarau, menjadi kendala utama yang menghambat optimalisasi masa tanam. Oleh karena itu, diperlukan intervensi manajemen pembangunan yang lebih komprehensif untuk mengatasi hambatan biofisik dan teknis tersebut secara permanen.

Pengembangan kawasan Agropolitan Rawa Pitu di masa depan harus bergeser secara fundamental dari sekadar pendekatan pemberian bantuan sarana produksi pertanian (saprotan) menuju pembangunan ekosistem industri pertanian yang lengkap. Fokus utama dalam manajemen pengembangan ini mencakup tiga pilar kunci, yaitu peningkatan aksesibilitas darat, manajemen pengairan terpadu, dan penguatan kelembagaan ekonomi lokal. Ketiga pilar ini harus berjalan secara simultan untuk menciptakan iklim usaha tani yang lebih efisien dan memiliki daya tawar yang tinggi. Peningkatan aksesibilitas melalui pembangunan jalan darat yang memadai merupakan langkah krusial untuk memutus isolasi wilayah dan mengurangi biaya logistik hasil panen yang selama ini membebani petani. Selaras dengan itu, manajemen pengairan terpadu melalui revitalisasi sistem irigasi dan pembangunan tanggul banjir harus diprioritaskan untuk memberikan kepastian masa tanam bagi masyarakat. Keberadaan infrastruktur fisik yang tangguh akan menjadi fondasi bagi masuknya investasi industri pengolahan hasil pertanian di kawasan Rawa Pitu.

Di sisi sosial-ekonomi, penguatan kelembagaan melalui optimalisasi peran kelompok tani dan koperasi menjadi sangat penting dalam manajemen perencanaan ini. Kelembagaan yang kuat akan memungkinkan petani untuk mengakses pasar yang lebih luas dan kompetitif secara kolektif, sehingga mereka tidak lagi bergantung pada sistem tengkulak yang merugikan. Transformasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa nilai tambah dari sektor pertanian tetap berputar di dalam wilayah Kabupaten Tulang Bawang, yang pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal. Integrasi antara perencanaan fisik infrastruktur dengan perencanaan ekonomi perdesaan di Rawa Pitu akan menjadi ujian nyata bagi efektivitas RPJMD 2025-2029. Keberhasilan manajemen pembangunan di kawasan ini akan menjadi tolak ukur sejauh mana pemerintah daerah mampu meningkatkan daya saing daerah melalui pemanfaatan potensi keunggulan komparatif. Jika dikelola dengan presisi, Rawa Pitu tidak hanya akan menjadi lumbung pangan, tetapi juga motor penggerak ekonomi baru yang mampu berkontribusi signifikan terhadap kemandirian fiskal kabupaten.

Secara keseluruhan, optimalisasi Rawa Pitu memerlukan komitmen politik dan anggaran yang konsisten lintas kepemimpinan. Manajemen perencanaan harus memastikan bahwa setiap intervensi pembangunan di kawasan agropolitan ini selaras dengan rencana tata ruang dan kebutuhan riil pelaku usaha tani. Dengan pendekatan yang terintegrasi, Kabupaten Tulang Bawang dapat mewujudkan visi transformasi ekonomi yang berkelanjutan, sekaligus memperkuat posisi daerah sebagai pusat pertumbuhan berbasis agrikultur di Provinsi Lampung.

Manajemen Risiko Bencana dan Permukiman Kumuh

Manajemen pembangunan di Kabupaten Tulang Bawang kini dituntut untuk memberikan perhatian serius pada aspek ketahanan bencana dan penataan ruang mikro secara terintegrasi. Sebagai wilayah yang secara geografis didominasi oleh area rawa dan aliran sungai besar, seperti Sungai Way Kanan dan Sungai Way Kiri, risiko bencana banjir menjadi ancaman permanen yang selalu mengintai stabilitas wilayah (Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan Kabupaten Tulang Bawang, Provinsi Lampung, 2021). Oleh karena itu, perencanaan pembangunan tidak lagi bisa hanya berfokus pada pertumbuhan ekonomi, melainkan harus menyertakan strategi mitigasi bencana yang komprehensif guna melindungi aset warga dan infrastruktur publik dari kerusakan yang berulang. Risiko bencana ini sering kali berkorelasi erat dengan keberadaan permukiman kumuh yang tumbuh di area-area rentan. Hasil penelitian dengan metode *Analytic Hierarchy Process* (AHP) di beberapa wilayah, seperti Kelurahan Daya Murni dan Panaragan Jaya, menunjukkan bahwa masalah kumuh di setiap lokasi memiliki kompleksitas yang berbeda-beda. Di satu wilayah, masalah utama mungkin terletak pada sistem drainase yang buruk, sementara di wilayah lain persoalan dominan bisa berupa manajemen persampahan yang tidak terkelola atau kualitas konstruksi bangunan yang tidak memenuhi standar keamanan.

Temuan ini memberikan indikasi kuat bagi manajemen pembangunan di tingkat kabupaten untuk meninggalkan pendekatan satu solusi untuk semua. Intervensi yang bersifat generalis sering kali gagal menyelesaikan masalah di akar rumput karena tidak menyentuh karakteristik spesifik dari permasalahan lokal. Dalam konteks penataan permukiman, kebijakan yang diterapkan di wilayah rawa harus berbeda dengan kebijakan di wilayah daratan tinggi, baik dari segi teknis rekayasa infrastruktur maupun pendekatan sosialisasinya kepada masyarakat. Untuk mencapai ketepatan sasaran dalam alokasi anggaran penanganan kumuh dan mitigasi bencana, diperlukan dukungan data spasial yang presisi. Penggunaan teknologi *Geographic Information System* (GIS) dapat membantu pemerintah daerah dalam memetakan titik-titik rawan banjir dan sebaran permukiman kumuh secara *real-time*. Dengan data yang akurat, manajemen perencanaan dapat melakukan analisis prioritas kriteria yang lebih objektif, sehingga dana pembangunan yang terbatas dapat dialokasikan pada lokasi yang memiliki tingkat urgensi dan risiko paling tinggi (Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan Kabupaten Tulang Bawang, Provinsi Lampung, 2021).

Selain aspek teknis, manajemen risiko bencana juga harus mengedukasi masyarakat yang tinggal di wilayah bantaran sungai mengenai pentingnya menjaga ruang terbuka hijau dan sistem sanitasi yang baik. Keterlibatan masyarakat dalam menjaga kebersihan drainase dan

tidak mendirikan bangunan di atas lahan resapan air merupakan kunci keberlanjutan dari setiap proyek fisik yang dibangun pemerintah. Integrasi antara pembangunan infrastruktur keras (*hard infrastructure*) dan edukasi sosial (*soft infrastructure*) akan menciptakan ekosistem permukiman yang lebih tangguh menghadapi perubahan iklim. Ke depan, sinkronisasi antara Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dengan Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) harus menjadi dokumen rujukan utama dalam setiap izin pemanfaatan ruang. Manajemen perencanaan harus memastikan bahwa pengembangan wilayah baru tidak menciptakan kantong-kantong kumuh baru yang rentan bencana di masa depan. Ketegasan dalam penegakan hukum tata ruang menjadi pilar pendukung agar investasi pembangunan yang dilakukan saat ini tidak terbuang sia-sia akibat bencana yang seharusnya bisa diantisipasi sejak tahap perencanaan (Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan Kabupaten Tulang Bawang, Provinsi Lampung, 2021).

Secara keseluruhan, transformasi manajemen pembangunan di Kabupaten Tulang Bawang menuju kota yang tangguh bencana memerlukan kolaborasi lintas sektoral antara dinas pekerjaan umum, badan penanggulangan bencana, dan badan perencanaan. Dengan memadukan analisis ilmiah seperti metode AHP, teknologi spasial dan manajemen kebijakan yang adaptif, pemerintah daerah dapat mewujudkan permukiman yang tidak hanya layak huni dan produktif secara ekonomi, tetapi juga aman bagi seluruh lapisan masyarakat dari ancaman bencana hidrometeorologi.

Restrukturisasi Manajemen PAD

Restrukturisasi manajemen Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi agenda mendesak bagi Kabupaten Tulang Bawang untuk memperkuat kemandirian fiskal dan mengurangi ketergantungan pada dana transfer pusat. Langkah strategis pertama yang harus diambil adalah digitalisasi sistem pemungutan melalui implementasi *E-Tax* dan *E-Retribution* secara menyeluruh. Dengan mengadopsi sistem pembayaran nontunai untuk objek pajak seperti parkir, retribusi sampah, dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), pemerintah daerah dapat meminimalkan risiko kebocoran anggaran yang sering terjadi dalam transaksi tunai. Digitalisasi ini tidak hanya meningkatkan efisiensi administrasi, tetapi juga memperkuat transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan di mata publik. Selain digitalisasi, pemerintah daerah perlu melakukan intensifikasi terhadap objek pajak baru yang selama ini belum tergarap secara maksimal. Pendataan ulang dan pemutakhiran basis data terhadap potensi pajak reklame, pajak mineral bukan logam dan batuan, hingga pajak sarang burung walet menjadi sangat krusial. Sektor-sektor ini sering kali memiliki nilai ekonomi tinggi di lapangan, namun kontribusinya terhadap kas daerah masih rendah akibat lemahnya

pengawasan dan administrasi pendataan. Dengan pemetaan potensi yang lebih akurat, kebocoran pendapatan dari sektor-sektor non-tradisional ini dapat ditekan secara signifikan.

Langkah restrukturisasi selanjutnya adalah mengoptimalkan skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) dalam pengelolaan aset daerah yang potensial. Melibatkan sektor swasta dalam pengelolaan aset-aset tidur atau infrastruktur strategis dapat menjadi solusi cerdas di tengah keterbatasan anggaran daerah. Melalui pola bagi hasil yang saling menguntungkan, pemerintah daerah tidak hanya mendapatkan aliran pendapatan baru bagi kas daerah, tetapi juga memperoleh manfaat dari transfer teknologi dan profesionalisme manajemen yang dibawa oleh mitra swasta. Restrukturisasi ini juga mencakup pembenahan regulasi daerah agar tetap relevan dengan dinamika ekonomi digital dan perubahan aturan di tingkat nasional. Keterlambatan dalam pembaruan Peraturan Daerah mengenai tarif dan objek pajak sering kali menjadi penghambat legal bagi upaya intensifikasi pendapatan. Oleh karena itu, sinergi antara eksekutif dan legislatif dalam mempercepat sinkronisasi regulasi fiskal menjadi kunci agar setiap upaya pemungutan pajak memiliki landasan hukum yang kuat dan tidak menimbulkan sengketa di kemudian hari.

Penguatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) di instansi pengelola pendapatan juga merupakan bagian tak terpisahkan dari manajemen restrukturisasi. Personel di lapangan harus dibekali dengan kemampuan analisis data dan penguasaan teknologi informasi agar mampu mengoperasikan sistem digital dengan optimal. Selain itu, integritas petugas penagihan harus terus dipantau untuk memastikan bahwa setiap rupiah yang dipungut benar-benar masuk ke rekening kas umum daerah tanpa ada pemotongan ilegal atau praktik pungutan liar. Keberhasilan dalam meningkatkan PAD secara signifikan akan memberikan fleksibilitas atau ruang gerak finansial yang lebih luas bagi pemerintah daerah. Dengan kapasitas fiskal yang mandiri, Kabupaten Tulang Bawang akan memiliki kemampuan untuk membiayai program-program inovatif yang bersifat lokal dan mendesak, yang sering kali tidak terakomodasi oleh dana transfer pusat yang bersifat kaku (*earmarked*). Fleksibilitas ini sangat penting untuk merespons dinamika kebutuhan masyarakat secara cepat tanpa harus selalu menunggu arahan atau persetujuan dari pemerintah pusat (Anisman, 2021).

Transformasi manajemen pendapatan ini pada akhirnya akan bermuara pada peningkatan kualitas layanan publik dan pembangunan infrastruktur yang lebih merata. PAD yang kuat memungkinkan daerah untuk melakukan investasi jangka panjang pada sektor-sektor strategis seperti pendidikan dan kesehatan dengan standar yang melebihi batas minimal. Dengan demikian, restrukturisasi fiskal bukan sekadar upaya administratif untuk mengumpulkan uang, melainkan instrumen strategis untuk mewujudkan kesejahteraan

masyarakat Kabupaten Tulang Bawang yang berkelanjutan. Secara keseluruhan, komitmen politik dari pimpinan daerah menjadi penentu utama keberhasilan restrukturisasi manajemen PAD ini. Tanpa keberanian untuk melakukan perubahan sistem dan penegakan hukum yang tegas terhadap wajib pajak yang membandel, upaya peningkatan pendapatan hanya akan menjadi wacana tahunan. Integrasi antara teknologi, regulasi, dan integritas SDM harus menjadi fondasi baru bagi Kabupaten Tulang Bawang dalam membangun kedaulatan fiskal di masa depan.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Manajemen perencanaan pembangunan di Kabupaten Tulang Bawang secara umum telah menunjukkan performa yang impresif, terutama dalam mentransformasi indikator sosial dan kewilayahan. Keberhasilan yang paling menonjol adalah penghapusan status kecamatan dan desa tertinggal serta penurunan angka stunting yang sangat signifikan melalui efektivitas program sektoral yang berorientasi pada hasil. Hal ini mencerminkan bahwa strategi pembangunan yang dijalankan mampu menjawab kebutuhan dasar masyarakat dan memperbaiki kualitas hidup di tingkat akar rumput secara nyata. Namun demikian, di balik keberhasilan capaian sosial tersebut, penelitian ini menemukan tantangan serius pada aspek kapasitas fiskal dan kualitas proses perencanaan. Kerentanan sektor Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang belum optimal dan ketergantungan yang tinggi pada dana transfer pusat menjadi titik lemah yang krusial. Selain itu, proses partisipasi publik melalui Musrenbang dinilai masih bersifat teknokratis dan formalitas sehingga belum sepenuhnya mengakomodasi aspirasi kelompok marginal secara substantif dalam siklus perencanaan jangka menengah daerah.

Sebagai solusi strategis untuk periode 2025-2029, penelitian ini merekomendasikan adanya sinkronisasi fiskal yang lebih ketat, institusionalisasi program unggulan menjadi standar pelayanan minimal, serta penggunaan teknologi berbasis spasial untuk ketepatan pembangunan. Transformasi partisipasi publik yang lebih inklusif dan fokus pada penciptaan nilai tambah ekonomi di sektor agropolitan menjadi kunci utama. Dengan mengintegrasikan kemandirian fiskal dan presisi teknis, Kabupaten Tulang Bawang diharapkan mampu menciptakan tata kelola pembangunan yang berkelanjutan dan menjadi model percontohan bagi daerah lain di Indonesia.

Implikasi dari penelitian ini menegaskan bahwa keberlanjutan pembangunan di Kabupaten Tulang Bawang sangat bergantung pada transformasi manajemen dari pola ketergantungan fiskal menuju kemandirian ekonomi yang terdigitalisasi. Batasan penelitian ini terletak pada fokus analisis yang hanya mencakup dokumen perencanaan makro dan data

sekunder laporan keuangan periode transisi, sehingga belum memotret implementasi kebijakan secara mikro di tingkat kampung secara menyeluruh. Oleh karena itu, saran untuk penelitian selanjutnya adalah melakukan studi komparatif antar wilayah dengan menggunakan metode campuran (*mixed methods*) yang melibatkan survei lapangan terhadap kepuasan masyarakat pasca-program BMW serta menganalisis dampak nyata digitalisasi pajak daerah terhadap peningkatan rasio kemandirian fiskal secara longitudinal guna memberikan gambaran yang lebih presisi mengenai efektivitas tata kelola keuangan daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Anisman, H. B. (2021). *Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja keuangan pada pusat pendapatan Pemerintah Daerah Kabupaten Tulang Bawang (Studi pada Pemerintah Daerah Kabupaten Tulang Bawang)*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis.
- Darmawan, N. D., & Suprpta, I. N. (2020). Strategi Bappeda dalam melaksanakan perencanaan pembangunan daerah dengan anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) Kabupaten Buleleng. *Locus Majalah Ilmiah FISIP*, 12(2), 30–45.
- Djafar, F., & AP, S. (2024). *Aspirasi publik dan kapasitas lembaga dalam perencanaan pembangunan*. Mega Press Nusantara.
- Handini, N., Darwina, M., & Pangestoeti, W. (2025). Peran pemerintah daerah dalam mengoptimalkan potensi ekonomi lokal melalui inovasi kebijakan pembangunan berkelanjutan. *Jurnal Ilmiah Nusantara*, 2(5), 964–986. <https://doi.org/10.61722/jinu.v2i5.5793>
- Handraini, H., Frinaldi, A., Magriasti, L., & Naldi, H. (2024). Konsep desentralisasi dan otonomi daerah dalam meningkatkan kinerja pemerintahan desa di Indonesia. *Professional: Jurnal Komunikasi dan Administrasi Publik*, 11(2), 601–608. <https://doi.org/10.37676/professional.v11i2.7226>
- Isna, N. P., Rejo, S. I., & Kartini, D. S. (2025). Strategi pemerintahan dalam implementasi pengarusutamaan gender di Kabupaten Tulang Bawang tahun 2023. *Transparansi: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi*, 8(2), 309–321. <https://doi.org/10.31334/transparansi.v8i2.4898>
- Kuncoro, M. (2018). *Perencanaan pembangunan daerah: Teori dan aplikasi*. Gramedia Pustaka Utama.
- Lumbanraja, V., Riau, D. P., Rustiyana, R., & Anitasari, M. (2025). *Otonomi daerah: Konsep dasar, prinsip, peran dan kemandirian fiskal*. Star Digital Publishing.
- Mardiasmo, M. B. A. (2021). *Otonomi & manajemen keuangan daerah* (Edisi terbaru). Penerbit Andi.
- Muminah, S., & Suprajogo, T. (2025). Implementasi kebijakan pembangunan daerah melalui pendekatan bottom-up. *Scientific Journal of Reflection: Economic, Accounting, Management and Business*, 8(4), 1485–1495. <https://doi.org/10.37481/sjr.v8i4.1253>
- Munthe, B. K. (2025). Analisis hukum tata ruang di Indonesia: Tantangan dan implementasi dalam pembangunan berkelanjutan. *Media Hukum Indonesia (MHI)*, 3(1). <https://doi.org/10.5281/zenodo.14679595>

- Nasution, I., Ginting, T., & Gultom, S. (2026). *Perencanaan pembangunan berkelanjutan: Strategi menghadapi perubahan iklim dan ketidakpastian global*. CV. Ibreina Nisura Perkasa.
- Putri, D. A., Adriani, Z., & Juari, W. (2025). Upaya dalam meningkatkan loyalitas kerja karyawan dan implikasinya terhadap produktivitas pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jambi. *Jurnal Ilmiah Ekonomi, Akuntansi, dan Pajak*, 2(1), 193–200. <https://doi.org/10.61132/jieap.v2i1.875>
- Rencana pembangunan kawasan perdesaan Kabupaten Tulang Bawang, Provinsi Lampung*. (2021). Pusat Perencanaan dan Pengembangan Wilayah IPB University.
- Rini, A., Murniati, K., & Affandi, M. I. (2024). Analisis dampak dana desa terhadap pengembangan wilayah di Kabupaten Tulang Bawang. *JiIP-Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 7(7), 6967–6977. <https://doi.org/10.54371/jiip.v7i7.4936>
- RPJMD 2025–2029 dan perubahan APBD Tulang Bawang disetujui*. (2025).
- Siagian, S. P. (2019). *Administrasi pembangunan: Konsep, dimensi, dan strateginya*. Bumi Aksara.
- Sormin, A. (2025). *Forum RPJMD dan Musrenbang RKPD, Bupati Tulang Bawang Barat sampaikan ini target pembangunan 2026*.
- Sugiyono. (2022). *Metode penelitian kualitatif, kuantitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Widjaja, G., & Dhanudibroto, H. (2025). Koordinasi antar-lembaga pemerintah dan efektivitas kebijakan kesejahteraan. *SIBATIK Journal: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, dan Pendidikan*, 4(7), 1323–1332. <https://doi.org/10.54443/sibatik.v4i7.2945>
- Wijaya, M. (2025). *Perencanaan pembangunan daerah*. CV Eureka Media Aksara.